

ABSTRAK

Dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, dan tanah tidak subur lagi sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa, dan negara. Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertambangan. Tesis ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2). Untuk menganalisa apakah selama ini sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin dapat menimbulkan efek jera. 3). Untuk mengetahui hambatan dan solusinya agar penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan efek jera. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. 2). Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal. Hal ini berpengaruh pada tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal. 3). UU Minerba terdapat 4 (empat) kelemahan yang menurut beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain, yaitu: a). Pada Pasal 169 huruf (a) mengenai keberlakuan Kontrak Karya. b). Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur mengenai Kuasa Pertambangan (KP). c). UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham. d). UU Minerba membuat bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan.

Kata Kunci : Sanksi, tindak Pidana, Pertambangan.

ABSTRACT

The impact of unlicensed mining is the occurrence of landslides, sinks, floods, and infertile land that will cause loss to the people, nation and state. Based on existing data on law enforcement officials in Indonesia, it was found that there is still a lack of public legal awareness in the mining sector. This thesis is entitled "The Implementation of Criminal Sanctions Against Mining Criminal Acts without Permission to Cause a Deterrent Effect (Study in the Legal Areas of the Central Java Regional Police)".

Research objectives in this study: 1). To find out the application of criminal sanctions against mining crimes without permission in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. 2). To find out whether all this time criminal sanctions against mining crimes without permission can have a deterrent effect. 3). To find out the obstacles and solutions so that the application of criminal sanctions against mining crimes can cause a deterrent effect. The research method uses qualitative methods with a sociological juridical approach.

The results of the study concluded that: 1). Criminal provisions against illegal mining / illegal mining are regulated in Law Number: 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which is regulated in Article 158, Article 160 Paragraph (1) and Paragraph (2), Article 161, Article 163 Paragraph (1) and Paragraph (2), and Article 164. 2). The Mineral and Coal Mining Law only regulates the maximum threat. This has an effect on the demands of the Public Prosecutor and the decisions to be handed down by the Judges. In the absence of a minimum penalty, the prosecutors and judges may drop the charges and decisions with a low criminal threat, so that it is feared not to give a deterrent effect to the illegal mining actors. 3). The Minerba Law has 4 (four) weaknesses which according to some circles are contradictory to each other, namely: a). In Article 169 letter (a) concerning the entry into force of the Contract of Work. b). Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) is not regulated regarding Mining Authorities (KP). c). The Minerba Law regulates the obligations of business entities holding IUP and IUPK holders whose shares are owned by foreigners to divest shares. d). The Minerba Law shifts the pattern of relations between the Government and mining businesses.

Keywords: Punishment, Criminal Act, Mining.